

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvi
ABSTRAK.....	xxiii
ABSTRACT	xxiv
تجريد.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Penegasan Istilah	13
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN TEORI.....	17
A. Kajian Efektivitas	17
1. Pengertian Efektifitas.....	17
2. Efektivitas Hukum.....	19
B. Landasan Yuridis.....	24
1. Pengertian Landasan Yuridis.....	24
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	25
3. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	26

C. Otonomi Daerah dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum	28
1. Pengertian Otonomi Daerah	28
D. Kajian Pemerintahan Daerah	31
1. Pengertian Pemerintah Daerah	31
E. Pengertian Peraturan Daerah	33
1. Kesejahteraan Sosial	34
2. Teori Patologi Sosial	36
3. Pembinaan dan Pengawasan	38
4. Ketertiban Umum	41
F. Pengertian Pengemis dan Gelandangan	43
1. Pengertian Pengemis	43
2. Pengertian Gelandangan	46
G. Kajian Umum Fiqih Siyasah	49
1. Pengertian Fiqih Siyasah	49
2. Objek Kajian Fiqih Siyasah	52
3. Manfaat Fiqih Siyasah	54
H. Penelitian Terdahulu	55
BAB III METODE PENELITIAN	58
A. Jenis Penelitian	58
B. Lokasi Penelitian	60
C. Kehadiran Peneliti	60
D. Data dan Sumber Data	61
E. Teknik Pengumpulan Data	62
F. Teknik Analisis Data	63
1. Reduksi Data	64
2. Penyajian Data	64
3. Pembahasan dan Penarikan Kesimpulan	65
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	65
1. Tahap Tahap Penelitian	66
BAB IV HASIL PENELITIAN	68
A. Deskripsi Data	68
1. Gambaran Umum Tempat Penelitian	68

1. Praktik Pembinaan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto Dalam Menangani Pengemis Dan Gelandangan di Kabupaten Mojokerto Perspektif Peraturan Daerah Pasal 39 Nomor 2 Tahun 2013	72
2. Praktik Pembinaan Pengemis Dan Gelandangan Di Wilayah Kabupaten Mojokerto Ditinjau Dari Fiqh Siyasah	85
BAB V PEMBAHASAN	91
A. Praktik Pembinaan Pemerintahan Kabupaten Mojokerto Dalam Menangani Pengemis Dan Gelandangan di Kabupaten Mojokerto Perspektif Peraturan Daerah Pasal 39 Nomor 2 Tahun 2013	92
1. Koordinasi Secara Berkala.....	92
2. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, sosialisasi.....	93
3. Pendidikan, pelatihan, pemagangan.....	95
4. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi	96
B. Praktik Pembinaan Pengemis Dan Gelandangan Di Wilayah Kabupaten Mojokerto Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.....	98
1. <i>Hifz Al-Nafs</i> (Menjaga Jiwa).....	98
2. Penerapan <i>Hifz Al-Maal</i> (Menjaga Harta)	99
3. <i>Karamah Al-Insan</i> (Menjaga Kehormatan Manusia)	100
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	103

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Lokasi Penelitian	68
Gambar 4.2 Halaman Depan Dinas Sosial.....	69
Gambar 4.3 Struktur Organisasi	70
Gambar 4.4 Dokumentasi Wawancara	74
Gambar 4.5 Dokumentasi Pengemis dan Gelandangan.....	77
Gambar 4.6 Dokumentasi Kegiatan.....	78
Gambar 4.7 Dokumentasi Kegiatan.....	84

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I.....	107
LAMPIRAN II.....	108
LAMPIRAN III	109
LAMPIRAN IV	111
LAMPIRAN V.....	114
LAMPIRAN VI	115
LAMPIRAN VII.....	116